

## ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait permohonan hak asuh bagi anak yang orang tuanya berkelakuan buruk kepada anak yang masih dibawah umur dan mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak menurut perspektif Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada kekaburan norma pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1 mengenai permohonan hak asuh anak, namun apabila dalam hal orang tua dari anak merupakan orangtua tunggal, dan tidak adanya pihak keluarga yang mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak kepada pejabat yang berwenang. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum mengenai hak asuh anak apabila dalam hal tidak adanya pihak kerabat yang mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak terhadap anak yang menjadi korban dari orang tua tunggal yang berkelakuan buruk terhadap anak yang masih di bawah umur. Maka dari itu jaksa pengacara negara dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum melalui permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua harus segera dilaksanakan untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan pembebasan dan/atau pemecatan orang tua dari kekuasaannya apabila terjadi dalam hal orangtua tunggal yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Pemenuhan hak asuh anak menurut perspektif beberapa Undang-Undang sama halnya dengan menggantikan peran sebagai orang tua, sehingga wali menjalankan kekuasaannya dengan kewajibannya yang menempel sebagai seorang wali dan sebagai orang tua, sama halnya dengan memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya dengan syarat syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang serta memenuhi kewajibannya sebagai wali hak asuh anak yang telah diatur dalam undang-undang untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

**Kata kunci :** *Pencabutan hak asuh anak, Berkelakuan buruk.*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal regulations regarding custody applications for minors whose parents exhibit abusive behavior towards them, as well as to understand the fulfillment of children's rights from a legal perspective. The research utilizes a normative juridical research method based on the ambiguity of norms in Article 49, paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning custody applications. However, if the child's parents are single parents and there are no family members filing a request to revoke custody from the competent authority, there is a need for legal certainty regarding child custody. This is particularly important when there are no relatives applying for the revocation of custody rights for a minor child who is a victim of abusive behavior from a single parent. Therefore, the state prosecutor in this case has the authority to enforce the law through a request to release a father/mother from their parental authority, which should be promptly implemented to advocate for the rights of the child by filing a lawsuit for exemption and/or dismissal of parental authority, especially in cases where a single parent commits sexual violence against their biological child. The fulfillment of child custody rights, from the perspective of several laws, entails assuming the role of a parent, whereby the guardian exercises their authority along with the attached obligations as a guardian and a parent. This includes the duty to nurture and educate the child to the best of their ability, subject to the conditions stipulated in the law, while fulfilling their obligations as a guardian of custody rights, as regulated by the law, to protect and fulfill the rights of the child to ensure their optimal growth and development.*

**Keyword :** *Revocation of child custody, misbehavior.*